



**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, EVALUASI ANGGARAN DANA DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA CENKERING
PEKAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA**

Masta Sembiring¹

1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

This study aimed to examine and analyze the effect of budget participation on accountability in Cengkering Pekan Village, Medang swift District, Batu Bara Regency. To test and investigate the impact of budget evaluation on responsibility in Cengkering Pekan Village, Medang swift District, Batu Bara Regency. To try and analyze the effect of budget participation, budget evaluation, clarity of budget targets on accountability in Cengkering Pekan Village, Medang swift District, Batu Bara Regency. The approach in this study is to use an associative process.

The population in this study were all Village Apparatus Work Units within the scope of the Cengkering Pekan Village office. The number of samples in this study was 32 respondents. The data in this study were obtained from primary data through a questionnaire technique. In this study, the data analysis technique used is a statistical analysis using SPSS 15 software. Based on the results of data analysis and discussion that has been presented in Chapter IV, the conclusions that can be drawn from this research are: Budget participation has a significant effect on accountability. Budget evaluation has an impact on responsibility. Budget participation and budget evaluation simultaneously have a significant positive impact on accountability.

Keywords : Budget Participation; Budget Evaluation; Accountability

Correspondence to : mastasembiring@umsu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa dalam lingkup kantor Desa Cengkering Pekan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 responden. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik pengambilan angket. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 15. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap



akuntabilitas. Partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas.

Kata Kunci : Partisipasi Anggaran; Evaluasi Anggaran; Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang akuntabilitas pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian akuntabilitas yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya Undang – undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang – undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Undang – undang No. 32 tahun 2004 dan Undang – undang No. 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Penerapan anggaran berbasis akuntabilitas diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis akuntabilitas dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis akuntabilitas menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Anggaran Berbasis Akuntabilitas (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Anggaran dengan pendekatan akuntabilitas menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas akuntabilitas output. Pendekatan anggaran akuntabilitas disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2018). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada akuntabilitas akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran akuntabilitas secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006).

Penyusunan anggaran berbasis akuntabilitas bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis akuntabilitas tersebut



diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis akuntabilitas memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan akuntabilitas organisasi yang berpedoman pada prinsip value for money.

Penerapan ABK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah mengubah mind set tidak hanya pada lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Mind set DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi output base, tidak lagi input base. Penyusunan Rancangan ADD di Kantor Desa Cengkering Pekan dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dituangkan dalam nota kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Kepala Desa dan perangkat desa, setelah itu dilakukannya Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, setelah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat RKA-SKPD atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang ADD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran ADD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi ADD, ketika dalam proses evaluasi ini ADD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang ADD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran ADD.

(Tangkilisan, 2010) menyatakan: Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Menurut (Ulum, 2004) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan-aturan dan tradisi organisasi seperti dalam pembentukan sistem pengendalian internal, partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, merancang tujuan anggaran, budaya organisasi, komitmen organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya yang mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan akuntabilitas aset nampak sangat rumit dan complicated, bahkan seolah tidak dapat terselesaikan, padahal sebenarnya penyelesaiannya bisa "sangat sederhana". Yang menjadi permasalahan adalah pemerintah daerah tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan anggaran dan belanja yang diakibatkan oleh anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan dapat dikatakan gagal.

Pada penelitian ini peneliti hanya faktor sistem yang mempengaruhi akuntabilitas seperti partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan evaluasi anggaran. Hal tersebut dilakukan karena Dalam penilaian akuntabilitas, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek tertentu saja, melainkan meliputi berbagai aspek yang bersifat menyeluruh. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana akuntabilitas pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama akuntabilitas instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Untuk Pemerintahan Desa Cengkering Pekan, berdasarkan data Anggaran Dana Desa Tahun 2017-2019, secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan akuntabilitas dan perbaikan akuntabilitas yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

TABEL 1. Data Anggaran Dana Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten batubara

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2017	4.625.169.942.881	3.723.643.299.085	81
2018	5.467.952.757.114	4.374.968.274.136	80
2019	5.735.922.591.995	4.523.672.134.655	79

Sumber : LAKIP Desa Cengkering Pekan Tahun 2014



Berdasarkan tabel I.1 di atas bahwa realisasi belanja Dana Desa pada tahun 2017-2019 tidak mencapai 100% sementara menurut (Halim, 2008) Analisis terhadap akuntabilitas belanja daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Penilaian akuntabilitas anggaran belanja merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan ADD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Berdasarkan tabel I-1 terjadi penurunan persentase realisasi anggaran belanja dari tahun 2017-2019 yang artinya penggunaan anggaran belanja yang tidak efisien penggunaannya serta tidak maksimalnya peranan anggaran dalam mekanisme pengendalian atas proses operasional. Sesuai teori yang dikemukakan oleh (Mulyadi, 2001) bahwa Analisis terhadap belanja daerah secara umum terlihat dari realisasi biaya dan anggarannya. Apabila realisasi anggaran belanja daerah yang tidak melampaui anggaran (target) maka akuntabilitas dapat dinilai dengan baik”.

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas akuntabilitas ini merupakan bentuk pelaporan akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanahkan untuk melaksanakan program / kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Analisis terhadap akuntabilitas manjerial secara umum terlihat dari penyerapan anggarannya. Apabila penyerapan anggaran tidak memenuhi target maka akuntabilitas manajerial dapat dinilai dengan tidak baik. Ketidakefektifan dalam melakukan partisipasi dalam penyusunan anggaran serta pengawasan ataupun menjelaskan sasaran anggaran tersebut hal ini disebabkan oleh pimpinan memiliki kesibukan dalam melakukan pekerjaan sehingga susah untuk mengkoordinir dan mengatur beberapa staf yang ada di instansi sehingga akuntabilitas dari beberapa bidang tersebut tidak terlaksana dengan baik. Sementara menurut (Mashun, 2009) definisi akuntabilitas manajerial adalah “akuntabilitas manajer dalam kegiatankegiatan manajerial yang meliputi : perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, karakteristik, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, dan perwakilan atau representasi”.

Menurut (Mahmudi, 2010), Manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sub sistem dan menghubungkan mereka dengan lingkungannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen memegang peranan penting dalam mekanisme suatu organisasi. Dengan kata lain bahwa maju mundurnya suatu organisasi sangat tergantung pada penerapan fungsi-fungsi manajemen yang digunakan di dalam organisasi tersebut.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis akuntabilitas terhadap akuntabilitas akuntabilitas instansi pemerintah. (Ray, 2008), telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan



struktur desentralisasi terhadap akuntabilitas yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap akuntabilitas SKPD,

(Halim, A., & Syukri, 2006), menguji tentang Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah di pemerintah aceh, hasil ini menunjukkan Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh.

Pratiwy (2013), menguji Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap akuntabilitas pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Padang), hasil ini menunjukkan Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas maka hal-hal yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Realisasi belanja dana desa pada tahun 2017-2019 tidak mencapai 100%
 2. Terjadi penurunan persentase realisasi anggaran belanja dari tahun 2017- 2019
 3. Kinerja manajerial belum berjalan dengan baik karena nilai realisasi tidak mencapai target
- Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara?
2. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara?
3. Apakah partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara?

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Zuliandi dan Irfan (2013 : 14) bahwa pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan dimana untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau mengetahui bahwa adanya hubungan atau pengaruh diantara kedua variabel (variable bebas dan variabel terikat).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2007).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa dalam lingkup kantor Desa Cengkering Pekan yang terlibat dalam penyusunan anggaran dengan jumlah perangkat desa sebanyak 32 yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris, Bidang Pengelola Keuangan, Bidang Penetapan, Bidang Pengelola asset, Bidang Unit Pelaksana, Bidang Penertiban, Kelompok Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas (probability) dimana merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 responden, metode pemilihan sampel menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel hal tersebut dikarenakan bahwa jumlah populasi tidak mencapai seratus populasi. atau dalam

Dpenelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik pengambilan angket atau pengumpulan data penelitian dilaksanakan dari awalbulan Februari 2017 sampai dengan akhir bulan



April 2017. Pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner yang didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung.

Setelah dilakukannya pengumpulan kuesioner maka dari hasil kuesioner maka diuji terlebih dahulu keabsahan kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan realibilitas. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 15 dengan tahapan **Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik** terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas. Pengujian selanjutnya adalah **Uji Hipotesis** dengan **pengujian Secara Parsial, Pengujian Secara simultan, dan Koefisien Determinasi**

HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berjumlah 32 orang. Dimana responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Desa Cengkering Pekan Pada penelitian ini pula penulis menggunakan questioner sebagai alat untuk menganalisa data agar dapat menghasilkan penelitian yang berguna Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada dua (2) variabel X, yaitu partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan 1 (satu) variabel Y yaitu akuntabilitas (Y).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolonearitas, dan Uji Heterokedastisitas

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K- S), grafik Histogram, dan grafik Normal Plot. Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H0 : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu: jika nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data tidak normal, 2. jika nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi data normal. Hasil uji kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

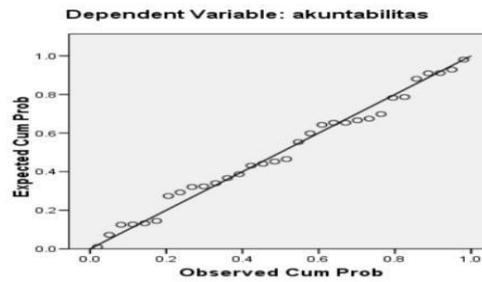
TABEL 4.7 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Partispasi anggaran	Evaluasi Anggaran	akuntabilita s
N		32	32	32
Normal Parameters(a,b)	Mean	30,5313	48,8438	40,1250
	Std. Deviation	3,61881	3,86973	2,92652
Most Extreme Differences	Absolute	,085	,101	,109
	Positive	,085	,058	,105
	Negative	-,083	-,101	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		,483	,572	,616
Asymp. Sig. (2-tailed)		,974	,899	,843



Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah partisipasi anggaran (X1) 0.974, evaluasi anggaran (X2) 0.899, kejelasan sasaran anggaran (Y) 0.722 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena $p > 0,05$. Data yang terdistribusi secara normal tersebut. Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (skewness) ke kiri maupun ke kanan.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 grafik P-Plot

Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independent. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), serta menganalisis matrik korelasi variabel- variabel independent. Besarnya tingkat multikolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: Tolerance > 0.10 , dan nilai VIF < 5 . Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian multikolinearitas:

TABEL 4.8 Uji Multikolinearitas

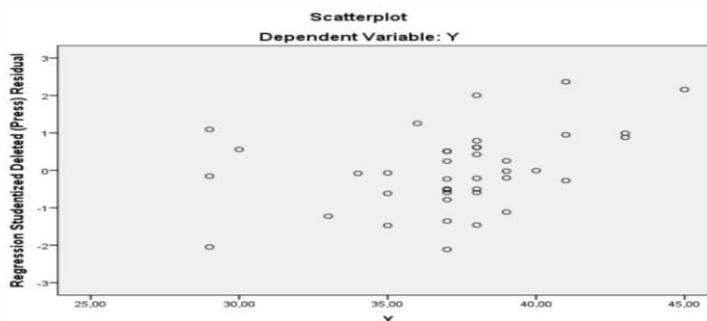
Model		Unstandardized		Standardized			Collinearity Statistics	
		Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	8,687	3,252		2,671	,012		
	Partispasiang garan	,216	,065	,267	4,332	,000	,903	1,107
	evaluasiang garan	,859	,092	1,136	9,322	,000	,393	2,546

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya



situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot).



Gambar 4.3 Scatterplot

Analisis Regresi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16.0 for Windows. Untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4, dilakukan memprediksi variabel multiple regression analysis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

α : Konstanta

β : Besaran koefisien regresi dari masing - masing variabel

Y : Akuntabilitas

X1 : Partisipasi Anggaran

X3 : Kejelasan sasaran anggaran

TABEL 4.9 Regresi Berganda

Model	Unstandardized		Standardized		T	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	8,687	3,252			2,671	,012
Partisipasianggaran	,216	,065	,267		4,332	,000
evaluasianggaran	,859	,092	1,136		9,322	,000

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 8,687 + 0,216X_1 + 0,859X_2 + 0,266X_3$$

Keterangan:

1. konstanta sebesar 8,687 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0$) maka nilai akuntabilitas sebesar 8,687.
2. β_1 sebesar 0,216 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 0,216 sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan akuntabilitas sebesar 0,216 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. β_2 sebesar 0,859 menunjukkan bahwa setiap kenaikan evaluasi anggaran



sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan akuntabilitas sebesar 0,859 dengan asumsi variabel lain tetap

Uji T

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya.

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 18, diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 4.10 Uji T

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	8,687	3,252		2,671	,012
	Partisipasianggaran	,216	,065	,267	4,332	,000
	Evaluasianggaran	,859	,092	1,136	9,322	,000

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya thitung untuk variabel partisipasi anggaran sebesar 4,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan ttabel adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,332 > 1,699$), maka partisipasi anggaran menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Evaluasi anggaran memiliki thitung sebesar 9,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan ttabel adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,332 > 1,699$), maka evaluasi anggaran secara individual mempengaruhi akuntabilitas. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Uji F

Untuk melihat pengaruh partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan F test. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 11 Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	222,141	3	74,047	47,817	,000(a)
	Residual	43,359	28	1,549		
	Total	265,500	31			

- a. Predictors : (Constant), Partisipaanggaran, evaluasianggaran
- b. Dependent Variable : akuntabilitas

Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh Fhitung sebesar 47.817 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan Ftabel sebesar 2,99 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran, evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($47,817 > 2,99$) dan signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).



Analisis Koefisien Regresi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (R Square) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai R Square adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R Square semakin mendekati 1, maka variabelvariabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R Square maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai R Square memiliki kelemahan yaitu nilai R Square akan meningkat setiap ada penambahan satu variabeldependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

TABEL 4.12 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.936 ^a	.877	.869	1.53030	1.169

Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R = 0,936 berarti hubungan antara pengendalian internal dan pengembangan mutu pegawai terhadap pencegahan kecurangan sebesar 93.6%. Artinya hubungannya erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat. R Square sebesar 0,877 berarti 87.7% pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh kesadaran pengendalian

internal dan pengembangan mutu pegawai. Sisanya 12.3% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitianini.

Adjusted R Square sebesar 0,869 berarti 86.9% pengendalian internal dan pengembangan mutu pegawai terhadap pencegahan kecurangan sementara sisanya 13.1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya thitung untuk variabel partisipasi anggaran sebesar 4,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan ttabel adalah 1,699, sehingga thitung > ttabel (4,332 > 1,699), maka partisipasi anggaranmenunjukkan angka < 0,05 (0,000 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Peterson dan Gibson (2003), secara detail menjelaskan bahwa prosedur pengendalian intern yang jelek berhubungan pada kekurangan dalam pemisahan tugas dan ketidakhadiran rekonsiliasi bebas dari uang dan dokumentasi yang jelek dipandang sebagai faktor dimana memungkinkan kecurangan untuk terjadi. Rae dan Nava (2008), dalam penelitiannya menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa kejadian penipuan pegawai lebih tinggi terjadi di suatu perusahaan yang kualitas pengendalian internalnya buruk ataupun rendah.

Prosedur pengendalian intern yang tidak memadai, seperti kurangnya pemisahan tugas atau prosedur pengolahan transaksi yang lemah, selanjutnya akan meningkatkan risiko pegawai menjadi lebih mudah dalam melakukan perbuatan curang di perusahaan. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengendalian intern menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mencegah kecurangan yang



dilakukan oleh pegawai. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk lebih mengetahui sejauh mana peranan pengendalian intern pada pencegahan kecurangan pegawai di perusahaan.

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Evaluasi anggaran memiliki thitung sebesar 9,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan ttabel adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,332 > 1,699$), maka evaluasi anggaran secara individual mempengaruhi akuntabilitas. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh Fhitung sebesar 113.632 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan Ftabel sebesar 3,09 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($113.632 > 3,09$) dan signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

Sifat pengembangan mutu pegawai ada tiga yaitu: pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap. Ketiga sifat ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Selain dapat meningkatkan kinerja pegawai agar lebih baik lagi dalam mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efektif dan efisien, pengembangan mutu pegawai juga sangat efektif dalam menumbuh kembangkan pemahaman pegawai untuk dapat mengetahui kecurangan (fraud awareness) dengan lebih luas dan mencegah terjadinya hal tersebut di perusahaan.

Rae dan Nava (2008), melakukan penelitian terhadap keadilan organisasi yang terjadi di lingkungan perusahaan bagi para pegawai perusahaan. Dari penelitiannya mereka menghasilkan suatu kesimpulan bahwa keadilan organisasi menjadi suatu hal yang berpengaruh dalam mencegah terjadinya penipuan pegawai di lingkungan perusahaan. Roberta (2010), melakukan penelitian terhadap denda yang diberikan terhadap pegawai yang melakukan suatu kesalahan di lingkungan perusahaan, dari penelitiannya tersebut Roberta menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dengan memberikan denda bagi seorang pegawai dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan di suatu perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas, partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas. Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain seharusnya perangkat desa meningkatkan partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran agar terciptanya akuntabilitas, pemimpin perusahaan dapat membantu perangkat desa yang tertarik untuk memahami dan mengetahui betapa pentingnya berpartisipasi dalam penyusunan anggaran pada perusahaan sehingga tercapainya tujuan perusahaan, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Salim. (2007). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Latif. (2014). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Dan Karakteristik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Al-Buhuts, Volume.10 Nomor 1.



- Abdul Wahab, Solichin. (2002). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri, 2003. *Anggaran Perusahaan*, Buku 1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Anthony, R. N. dan Govindarajan. (2003). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit Salemba Empat Edisi:1 Buku 2
- Apandi Nasehatun. 2004. *Budget and Control*. Jakarta : Grasindo.
- Arifin. (2007). *Teori keuangan dan Pasar modal*. Yogyakarta : Ekonisia. Atmosoeparto, Kisdarto, 2005. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ausaid (2001). *Intelektual Property Rights*. Asian Law Group
- Bastian, I. (2006). *Audit Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Beny Arifin W. (2012) *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntantansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Dwipayana, Ari. (2003). *Membangun Good Governance Di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. (2005) *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Falikhathun (2007). *Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan Dan Kohesivitas Kelompok*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 6, No.2 September 2007
- Fladimir Edwin Mbon (2014) *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Daerah Yogyakarta*
- Ghozali, Imam, (2001), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Undip.
- Ginting, Ahyari. (2009). *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta. BPFE. Halim, Abdul, (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen*. Cetakan Kedelapan belas. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta Hansen & Mowen. 2004. *Manajemen Biaya*, Edisi Bahasa Indonesia. Buku Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Ida Ayu Made Dwiki Paramatiha. (2002). *Pengaruh Ketetapan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Akuntabilitas*. *JRAI*, Vol 5 No.1, hal 85-101
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, (2000). *Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasi terhadap Keefektifan Partisipasi Anggaran dalam Peningkatan Akuntabilitas Manajerial: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur*. *Kelola*. Yogyakarta.
- Halim, A., & Syukri, A. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2,1(1).
- Halim. A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.



- Kennis, I. (2011). Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*: 707-721
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar
- Kurnia, Rahma, (2004). *Laporan Kegiatan Kursus identifikasi Dampak Lingkungan*, Jogjakarta, GEGAMA.
- Locke, E.A., (2009). Toward a Theory of Task Motivation and Incentives,” *Organizational Behavior and Human Performance*, pp. 157-189.
- Mangkuprawira, (2004), *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mashun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawar, Indra. (2009). Hasil Belajar (Pengertian dan Definisi). <http://indramunawar.blogspot.com/2009/06/hasil-belajar-pengertiandandefinisi.html?m=1>
- Pamudji, S., (2006), *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Rahadi, R., & Muslih, M. (2019). *Model Media Sosial di Sektor Publik : Studi Literatur*. 1–7.
- Ray, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subroto, B. (2014). *PENGUNGKAPAN WAJIB PERUSAHAAN PUBLIK KAJIAN TEORI DAN EMPIRIS (Pertama; U. Press, ed.)*. Malang: Press, UB.
- Suwanto, Priansyah, & Juni, D. (2011). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2010). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Offset YPAPI.
- Ulum, I. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Malang: UMM Press